

**DINAMIKA KETENAGAKERJAAN DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
DI PEDESAAN JAWA
(Kasus di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur)**

SUPRIYATI, SAPTANA DAN SUMEDI

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian RI.

ABSTRACT

The last periode, agricultural sector have to burdensome rural labor absorbtion, consequently declaning productivity of labor in agricultural sector and wage rate relatively stagnant. This paper obyective to study : (1) labor dinamic in the macro and micro level; (2) variety kind of labor activity and labor supply in wet land rural area; (3) structure of time labor allocation in household level; (4) trend of wage rate in wet land rural area. Both in macro and micro level labor absorbtion in agricultural sector each achieved 68 % and 66 %. Total labor absorbtion by members household about 75 – 127 days (21-35 %) from time avaibility. Trend of riel wage rate in two provincial (East Java and Central Java) relatively stagnant (1.03 – 2.03 % per years), so in West Java Provincial to declaning (0.09 %/years). This fact to indicate shown sign labor over supplay in the rural area. Several recomendation to solve this problem are land use optimalization by higher plant intencity; to developpe farming diversification, especially high value commodity; land and farming consolidation; and to developpe agroindustry based on local raw material.

Key Words: Labor Dinamic, Labor Absorption, Rural, Java.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima peran penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam menghasilkan devisa dan atau penghematan devisa, dan berfungsi dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Sektor pertanian merupakan penyedia pangan masyarakat. Oleh karena itu percepatan pembangunan pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Walaupun dalam sumbangannya terhadap PDB mengalami penurunan, namun sektor pertanian masih akan tetap memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian secara keseluruhan, karena mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya. Sampai dengan saat ini sektor pertanian tetap menyerap tenaga kerja terbesar dan menjadi penopang perekonomian di pedesaan, bahkan pada saat krisis ekonomi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mengalami sedikit peningkatan.

Pembangunan pertanian merupakan proses yang dinamis yang dalam jangka menengah atau panjang akan membawa dampak perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Transformasi sosial ekonomi tersebut dapat berupa pergeseran

sektoral, kelembagaan dan tatanilai yang ada dalam masyarakat. Perubahan sektoral secara agregat dapat di lihat dari sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan sumbangannya dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

Hasil kajian data makro menunjukkan bahwa titik balik untuk aktivitas ekonomi tercapai lebih cepat dibandingkan dengan titik balik penyerapan tenaga kerja (*labour turning point*). Artinya, laju pergeseran ekonomi sektoral relatif lebih cepat dibandingkan dengan laju pergeseran tenaga kerja. Perubahan struktur yang tidak berimbang diantaranya ditunjukkan oleh penurunan pangsa sektor pertanian terhadap PDB yang sangat tajam, yaitu dari 51,8 persen (1961) menjadi 16 persen (1995), pada tahun 2000/2001 masih relatif bertahan sebesar 17.03/16.39 persen; yang tidak diiringi dengan penurunan penyerapan tenaga kerja yang seimbang, yang hanya menurun dari 73,3 persen (1961) menjadi 48 persen (1995). Bahkan dengan adanya dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor pertanian, sebagai ilustrasi pada tahun 1997 penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian telah turun mencapai 41 persen, namun pada tahun 1998 melonjak kembali menjadi 45 persen (Sakernas, BPS Tabel 13, tahun 1999).

Gambaran mikro dinamika penyerapan tenaga kerja dan kesempatan kerja di pedesaan sangat dipengaruhi oleh kondisi agroekosistem setempat. Agroekosistem lahan sawah dipengaruhi oleh tipe irigasi, struktur penguasaan lahan pertanian, sistem usahatani, pola tanam dan siklus tanam, dan komoditas dominan yang diusahakan, serta sistem pola hubungan kerja. Intensitas tanam yang lebih tinggi yang tergambarkan dalam siklus dan pola tanam akan mempunyai daya serap terhadap penyerapan kesempatan kerja yang lebih tinggi. Struktur penguasaan lahan yang relatif lebih merata diperkirakan mempunyai daya serap yang lebih tinggi. Pengusahaan komoditas komersial bernilai ekonomi tinggi, seperti hortikultura khususnya sayuran dan perkebunan seperti tembakau mempunyai daya serap yang lebih tinggi, karena bersifat intensif kapital dan tenaga kerja.

Penurunan pangsa tenaga kerja sektor pertanian terhadap PDB secara nyata yang tidak diikuti penurunan dalam penyerapan tenaga sektor pertanian, dkuatirkan akan menyebabkab penurunan produktivitas dan pendapatan tenaga kerja sektor pertanian di pedesaan. Konsekuensinya adalah sektor pertanian menanggung beban penyerapan tenaga kerja yang semakin berat. Dengan demikian perlu di lihat perubahan-perubahan sosial ekonomi secara mikro di pedesaan, sehingga dapat diperkirakan kearah mana perubahan-perubahan tersebut terjadi, seta langkah antisipatif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Dinamika sosial ekonomi ketenagakerjaan yang penting diungkap adalah pergeseran ketenagakerjaan di tingkat makro dan mikro, apakah dinamika yang terjadi di tingkat makro juga terjadi di tingkat mikro. Dengan demikian di tingkat mikro akan dapat diungkap : (1)

Proporsi anggota rumahtangga usia kerja dan anggota rumah tangga yang bekerja menurut lokasi; (2) Keragaan jenis pekerjaan baik kepala rumah tangga (KK) maupun anggota rumah tangga (ART) menurut lokasi dan sektor usaha; (3) Struktur alokasi/ curahan waktu kerja rumah tangga menurut sektor usaha; (5) Perkembangan tingkat upah menurut jenis kegiatan antar lokasi; dan (6) Pasar tenaga kerja di pedesaan lahan sawah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tulisan ini ditujukan untuk mengkaji : (1) Mengkaji dinamika ketenagakerjaan di tingkat makro; (2) Gambaran mikro ketenagakerjaan di pedesaan lahan sawah; (3) Ketersediaan tenaga kerja dan keragaman jenis pekerjaan di pedesaan lahan sawah; (4) Struktur alokasi curahan waktu kerja rumah tangga di pedesaan lahan sawah; dan (5) Tingkat upah di pedesaan lahan sawah

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Menurut Novera *dalam* Syukur (1988), waktu sebagai sumberdaya ekonomi rumahtangga petani dapat dialokasikan pada kegiatan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) kegiatan yang menghasilkan pendapatan; (2)) kegiatan yang tidak menghasilkan pendapatan; (3) santai (*leisure*) dan (4) waktu yang dicurahkan untuk mendapat ketrampilan. Jumlah jam kerja yang dicurahkan pada suatu kegiatan dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja pada kegiatan tersebut, artinya semakin tinggi produktivitas tenaga kerja mendorong orang untuk mencurahkan waktu kerja lebih lama. Namun dalam kenyataannya, perilaku pekerja dalam mengalokasikan waktu kerja tidak hanya dipengaruhi produktivitas tenaga kerja, tetapi dipengaruhi juga oleh peubah-peubah sosial ekonomi antara lain : struktur pasar tenaga kerja, ketersediaan kesempatan kerja, karakteristik demografi rumahtangga, tingkat ketrampilan, pengalaman kerja dan penguasaan/pemilikan atas faktor-faktor produksi.

Sumaryanto (1988) mengemukakan bahwa curahan waktu kerja dari rumahtangga petani dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Faktor-faktor yang berpengaruh nyata dalam penawaran tenaga kerja ke usahatani padi dipengaruhi oleh luas lahan garapan, tingkat upah riil, pendapatan luar usahatani, status garapan, faktor kelembagaan hubungan kerja dan kondisi agroekosistem. Sementara itu curahan waktu kerja rumahtangga ke sektor luar pertanian dipengaruhi oleh tingkat upah pada kegiatan luar pertanian, dan pendapatan bersih dari sektor pertanaian. Menurut Supriyati (1990) ada indikasi pola penawaran tenaga kerja yang berbeda antara rumahtangga buruhtani dan petani. Pada rumahtangga buruhtani, sumberdaya yang dikuasai adalah tenaga kerja maka curahan waktu kerja (bekerja) merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan. Sementara pada

rumahtangga petani, masih ada pilihan antara bekerja di lahan sendiri atau bekerja di luar usahatani. Dengan demikian dalam analisis alokasi waktu kerja akan dibahas menurut status rumahtangga (rumahtangga petani dan buruhtani).

Cakupan Analisis

Sesuai dengan tujuan penelitian, kajian ini akan difokuskan pada dinamika ketenagakerjaan di tingkat makro dan di tingkat mikro yang khusus mengambil lokasi penelitian di pedesaan lahan sawah. Dinamika ketenagakerjaan di tingkat mikro mencakup keragaan ketenagakerjaan (ART usia kerja, ART yang bekerja, angka ketergantungan, dan jenis pekerjaan utama KK dan ART); struktur curahan/alokasi waktu kerja dan tingkat upah. Struktur curahan/alokasi waktu kerja rumahtangga contoh dibedakan atas menurut kegiatan di sektor pertanian dan non pertanian. Pada sektor pertanian dibedakan atas kegiatan pada lahan garapan sendiri dan kegiatan berburuh tani. Untuk melihat peranan lahan sawah di pedesaan lahan sawah maka, kegiatan pada lahan garapan sendiri dan berburuh tani dibedakan menurut jenis lahan (sawah dan non sawah). Sementara kegiatan non pertanian dibedakan atas kegiatan usaha, dan berburuh.

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pola curahan waktu kerja, maka pembahasan struktur alokasi waktu kerja dibedakan atas: **(1)** rataan rumahtangga contoh total; dan **(2)** rumahtangga contoh dibedakan menurut statusnya yaitu rumahtangga contoh buruh tani dan rumahtangga contoh petani (status berdasarkan pekerjaan utama kepala keluarga). Dalam pembahasan struktur alokasi waktu kerja akan dilakukan agregasi kabupaten contoh, yaitu Indramayu, Majalengka (Jawa Barat); Klaten (Jawa Tengah); Kediri dan Ngawi (Jawa Timur).

Analisis tingkat upah didasarkan atas data sekunder dari BPS dengan agregasi tingkat propinsi dan kegiatan (mencangkul, menanam dan merambat/menyiang) pada periode tahun 1989-2000.

Metoda Analisis

Analisis dinamika ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja dilakukan secara deskriptif analitik melalui tabel-tabel analisis. Dinamika ketenagakerjaan tingkat makro dianalisis pada 1995 dan 2000, dinamika ketenagakerjaan di tingkat mikro dianalisis pada kondisi tahun 2001 sementara data primer struktur curahan/alokasi waktu kerja dianalisis dalam periode satu tahun. Curahan waktu kerja di lahan sendiri dihitung dengan cara mengalikan luas lahan milik dengan curahan kerja pada usahatani yang diusahakan pada lahan tersebut, sementara curahan waktu kerja pada kegiatan berburuh diperoleh dari

kuesioner mengenai alokasi waktu berburuh tani pada berbagai lahan. Dengan demikian, curahan waktu kerja ART yang bekerja dalam satu tahun merupakan penjumlahan semua alokasi waktu kerja pada berbagai kegiatan, dan dapat disederhanakan sebagai berikut :

$$CK = \sum P_i + \sum NP_j$$

CK = Curahan waktu kerja

P_i = Curahan waktu kerja di sektor pertanian pada berbagai kegiatan

NP_j = Curahan waktu kerja di sektor non pertanian pada berbagai kegiatan

Curahan waktu kerja di sektor pertanian dibedakan atas : (1) Curahan waktu kerja di lahan sendiri (sawah dan non sawah) dan (2) Curahan waktu kerja di lahan orang lain/berburuh tani (sawah dan non sawah). Curahan waktu kerja di sektor non pertanian dibedakan menjadi curahan waktu pada kegiatan yang sifatnya usaha, kegiatan berburuh dan sebagai tenaga profesional (sebagai karyawan/pegawai). Struktur penyerapan tenaga kerja di pedesaan lahan sawah merupakan persentase curahan waktu kerja (CK) pada masing-masing kegiatan terhadap total curahan waktu kerja satu tahun.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian merupakan data primer hasil survei rumahtangga yang dilakukan oleh Puslitbang Sosek Pertanian bekerja sama dengan BAPPENAS/USAID/DAI dan juga data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Informasi data primer dalam studi ini difokuskan di lima kabupaten, yang tersebar di tiga propinsi, yaitu Majalengka dan Indramayu (Jawa Barat), Klaten (Jawa Tengah), Kediri dan Ngawi (Jawa Timur). Jumlah rumahtangga contoh pada masing-masing desa adalah 20 orang yang dipilih secara acak terstratifikasi (*stratified random sampling*) yang mewakili petani dan buruh tani, sebaran rumahtangga contoh menurut status ditampilkan pada Lampiran 1.

Data primer yang dikumpulkan mencakup data usahatani di lahan sawah (yang terdiri atas penggunaan input dan output), curahan kerja dan pendapatan dari semua kegiatan/bidang usaha yang dilakukan rumahtangga contoh. Pengumpulan data primer di tingkat petani mencakup data pada musim hujan (MH 2000/2001) dan musim kemarau (MK 2001).

GAMBARAN MAKRO KETENAGAKERJAAN DI PEDESAAN

Angkatan kerja dan Angkatan Kerja yang Bekerja

Indonesia termasuk salah satu negara yang dipandang berhasil dalam pengendalian jumlah penduduk, namun hingga saat ini masih menghadapi masalah kependudukan yang sulit dipecahkan, terutama dalam penyerapan angkatan kerja. Permasalahan dalam penyerapan tenaga kerja mencapai titik kritis saat terjadi gelombang krisis ekonomi.

Keragaan angkatan kerja di Indonesia dan di propinsi contoh dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. Berdasarkan Tabel 1 dan 2 memberikan beberapa gambaran pokok sebagai berikut : (1) Proporsi angkatan kerja yang bekerja mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu di perkotaan meningkat dari hanya 87,00 persen (1995) menjadi 93,58 persen (2000), dan di pedesaan meningkat dari 95,03 persen (1995) menjadi 95,58 persen (2000); (2) Hasil analisis di atas dapat mengindikasikan telah mulai membaiknya perekonomian nasional, meskipun diperkirakan peningkatan proporsi angkatan kerja yang bekerja terhadap angkatan kerja kemungkinan besar bekerja dibawah jam kerja normal; (3) Keragaan proporsi angkatan yang bekerja (AKB) terhadap angkatan kerja (AK) baik secara nasional maupun di masing-masing propinsi contoh, berkisar antara 90-96 persen, hal tersebut menunjukkan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (4-10 persen di pedesaan), jika pengangguran terselubung diperhitungkan maka tingkat pengangguran di pedesaan lebih tinggi lagi.

Tabel 1. Perkembangan Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja yang Bekerja di Indonesia, 1995-2001

Uraian	Tahun 1995 (000 orang)1)			Tahun 2000 (orang)2)		
	Angkatan Kerja	AK Bekerja	(%)	Angkatan Kerja	AK Bekerja	(%)
1. Kota	28869546	25711779	87,00	38298608	35839367	93,58
2. Desa	55360576	52610383	95,03	59134517	56689106	95,58
3. Kota + Desa	84230122	78322162	92,99	97433125	92528473	94,97

Sumber : 1) SUPAS, 1995 (penyesuaian dilakukan dengan mengurangi AK umur 10-14 tahun)

2) Hasil Sensus Penduduk, 2000 (BPS)

Tabel 2. Keragaan Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja yang Bekerja di Tiga Propinsi Cntoh, Tahun 2000

Uraian	Angkatan Kerja (Orang)	AK Bekerja (Orang)	Proporsi AKB thd AK (%)
1. Jawa Barat			
-Kota	7 614 525	7 241 825	95.11
-Desa	8 432 772	8 092 533	95.97
-Kota+Desa	16 047 297	15 334 358	95.56
2. Jawa Tengah			
-Kota	6 140 918	5 745 755	93.57
-Desa	10 476 386	10 018 289	95.63
-Kota+Desa	16 617 304	15 764 044	94.87
3. Jawa Timur			
-Kota	6 742 265	6 356 926	94.28
-Desa	10 773 107	10 312 856	95.73
-Kota+Desa	17 515 372	16 669 782	95.17
Indonesia			
-Kota	38 298 608	35 839 367	93.58
-Desa	59 134 517	56 689 106	95.86
-Kota+Desa	97 433 125	92 528 473	94.97

Sumber : Hasil Sensus Penduduk, 2000 (BPS)

Struktur Kesempatan Kerja

Semenjak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 proporsi kesempatan kerja sektor pertanian mengalami peningkatan, padahal hampir keseluruhan sektor ekonomi mengalami kemacetan. Sebagai ilustrasi proporsi kesempatan kerja sektor pertanian tahun 1997 sebesar 22,20 persen dan pada tahun 1998 meningkat menjadi sebesar 24,37 persen (BPS, 1999). Sementara itu, gambaran tentang perkembangan penyerapan tenaga kerja berdasarkan lapangan usaha di pedesaan Indonesia dan propinsi contoh dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4.

Berdasarkan Tabel 3 dan 4 merefleksikan beberapa hal pokok sebagai berikut : (1) Proporsi secara keseluruhan penyerapan TK di pedesaan Indonesia mengalami peningkatan dari 54,16 juta orang (1995) meningkat menjadi 56,69 juta orang (2000), atau hanya meningkat sebesar 1.02 persen; (2) Proporsi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di pedesaan mengalami peningkatan dari 32,91 juta orang atau 60.77 persen (1995) menjadi 38.43 juta orang atau 67.79 persen (2000), atau mengalami peningkatan sebesar 8.33 persen; (3) Sementara itu, sektor lainnya mengalami penurunan dalam penyerapan tenaga kerja; (4) Dari gambaran di atas nampak bahwa dalam situasi krisis sektor pertanian dapat berperan sebagai sektor penyelamat dalam penyerapan tenaga kerja, meskipun dapat diduga bahwa sebagian tenaga kerja menjadi pengangguran tak kentara (*under employment*).

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor pertanian di pedesaan membawa beberapa implikasi pokok : (1) semakin menurunnya produktivitas kerja sektor pertanian terutama di Jawa, karena kelebihan tenaga kerja tidak dapat direspon dengan perluasan areal; (2) meningkatnya pengangguran tidak kentara di pedesaan, yang kalau tidak segera di carikan pemecahannya akan mempunyai implikasi sosial ekonomi yang luas; (3) semakin sulit meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pertanian. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanama, pengembangan usahatani komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan manajemen usahatani, serta pengembangan agroindustri berbasis bahan baku setempat harus menjadi prioritas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Tabel 3. Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Pedesaan Indonesia, 1995-2000

Lokasi	Penyerapan TK Tahun 1995		Penyerapan TK Tahun 2000	
	(orang)	(%)	(orang)	(%)
1. Pertanian	32 914 901	60.77	38 427 606	67.79
2. Industri	5 320 192	9.82	2 551 966	4.50
3. Perdagangan	6 596 540	12.18	4 704 911	8.30
4. Lainnya	9 328 104	17.22	11 004 623	19.41
5. Jumlah	54 159 737	100.00	56 689 106	100.00

Sumber : 1) SUPAS, 1995 (BPS)

2) Hasil Sensus Penduduk, 2000 (BPS)

Tabel 4. Struktur Tenaga Kerja Pedesaan Menurut Sektor Ekonomi di Indonesia dan Tiga Propinsi Contoh, 1995-2000

Lokasi	Penyerapan Tenaga Kerja 1995 (orang)1)					Penyerapan Tenaga Kerja 2000 (orang)2)				
	Pertanian	Industri	Perdagangan	Lainnya	Jumlah	Pertanian	Industri	Perdagangan	Lainnya	Jumlah
Indonesia	60.77	9.82	12.18	17.22	54,159,737	67.79	4.50	8.30	19.41	56,689,106
Jawa Barat	44.80	12.53	17.35	25.31	8,335,047	49.85	6.16	13.51	30.48	8,092,533
Jawa Tengah	63.56	1.35	14.23	20.86	9,458,593	65.73	6.00	9.84	18.43	10,018,289
Jawa Timur	55.99	12.13	14.46	17.43	10,952,788	67.21	5.08	9.35	18.36	10,312,856

Sumber : 1) Hasil SUPAS, 1995 (BPS)

2) Hasil Sensus, 2000 (BPS)

Pengangguran Tidak Kentara

Untuk menguji apakah peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan angkatan kerja yang bekerja memberikan gambaran bahwa kondisi perekonomian telah pulih akan dilihat jumlah dan proporsi tenaga kerja pertanian di pedesaan menurut jumlah jam kerja (Tabel 5). Dari Tabel 5 merefleksikan beberapa hal sebagai berikut : (1) telah terjadi peningkatan proporsi penyerapan tenaga kerja dan angkatan kerja yang bekerja secara penuh (*full employment*) dari 13,18 juta orang atau 40,05 persen (1995) menjadi 15,71 juta atau 42,67 persen (2000); (2) sebaliknya terjadi penurunan proporsi tenaga yang bekerja di bawah kapasitas (*under employment*), yaitu dari 18,27 juta atau 55,50 persen (1995) menjadi 19,15 juta atau 52,19 persen (2000); serta penurunan proporsi tenaga kerja yang bekerja di atas kapasitas yaitu dari 737 ribu orang atau 2,24 persen (1995) menjadi 753 ribu orang atau 2,04 persen (2000); (3) Sementara itu jumlah tenaga kerja yang sementara tidak bekerjapun sedikit mengalami peningkatan dari 726 ribu orang atau 2.21 persen (1995) menjadi 1,14 juta atau 3,10 persen (2000), yang menunjukkan meningkatnya jumlah pengangguran di sektor pertanian di pedesaan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja pertanian di pedesaan telah mengalami peningkatan meskipun relatif lambat dari kondisi

sebelum krisis ke kondisi setelah krisis, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi.

Tabel 5. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja Pertanian di Pedesaan Menurut Jumlah Jam Kerja Per Minggu di Indonesia, Tahun 1995 dan 2000

Uraian	Tahun 1995 ¹⁾		Tahun 2000 ²⁾	
	(Orang)	(%)	(Orang)	(%)
0 *)	726 175	2.21	1 141 188	3.10
<35	18 268 639	55.50	19 153 713	52.19
55-59	13 183 220	40.05	15 714 539	42.67
>60	736 867	2.24	753 146	2.04
Jumlah	32 914 901	100.00	36 828 729	100.00

Sumber : 1) Hasil SUPAS, 1995 (BPS)

2) Hasil Sensus Penduduk, 2000

*) Sementara tidak bekerja

KERAGAAN MIKRO KETENAGAKERJAAN PEDESAAN

Gambaran Umum ART Usia Kerja

Keragaan jumlah anggota rumah tangga (ART) pada ke lima kabupaten lokasi penelitian menunjukkan gambaran yang mirip, jumlah ART berkisar antara 3.71 – 4.82 orang dalam satu rumahtangga. Rata-rata jumlah anggota rumahtangga terbesar terdapat di Kabupaten Klaten dengan 4,40 anggota rumahtangga per KK, dan terendah di Indramayu dengan 3,71 orang anggota per rumahtangga. Jumlah ART dalam rumahtangga, memiliki arti ekonomi yang penting, yaitu sebagai sumber pendapatan rumahtangga jika yang bersangkutan memiliki pekerjaan, atau merupakan tanggungan keluarga jika sebaliknya. Dengan demikian menjadi penting untuk melihat komposisi anggota rumahtangga yang termasuk dalam ART usia kerja dan ART usia kerja yang bekerja. Dari pemilahan ini dapat diperoleh angka atau tingkat ketergantungan, yang menunjukkan rasio jumlah ART usia kerja yang menjadi tanggungan ART usia kerja yang bekerja.

Dari Tabel 6 terlihat kisaran proporsi ART usia kerja pada lokasi penelitian berkisar antara 59 persen (Kabupaten Majalengka) sampai 71 persen (Kabupaten Kediri). Berarti sekitar 30 – 40 persen anggota keluarga, masih sekolah atau sudah lanjut usia. Keragaman tingkat partisipasi kerja (persentase ART usia kerja yang bekerja terhadap ART usia kerja) antar lokasi penelitian cukup besar. Tingkat partisipasi kerja anggota keluarga berkisar antara 65 persen (Kabupaten Indramayu) sampai dengan 81 persen (Kabupaten Majalengka). Angka ketergantungannya berkisar antara 0,94 – 1,3 yang berarti satu orang bekerja menanggung 0,94 – 1,3 orang tidak bekerja. Dibandingkan dengan luar Jawa, angka

ketergantungan di Jawa lebih rendah (Supriyati 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan kerja di Jawa lebih tersedia.

Tabel 6. Rata-rata jumlah anggota rumahtangga (ART), ART usia kerja dan ART usia kerja yang bekerja per rumahtangga di lima kabupaten contoh, tahun 2001

Kabupaten/Tipe	Jumlah ART	ART usia kerja		ART usia kerja yang bekerja		Angka ketergantungan ³⁾
		Orang	% ¹⁾	Orang	% ²⁾	
1. Indramayu	3.71	2.49	67.00	1.61	64.82	1.30
2. Majalengka	3.85	2.27	58.88	1.84	81.01	1.10
3. Klaten	4.40	3.05	69.35	2.09	68.41	1.11
4. Kediri	4.05	2.88	71.20	2.09	72.44	0.94
5. Ngawi	4.19	2.85	68.06	2.15	75.44	0.95

Sumber: Data primer (diolah)

Keterangan: 1) persen terhadap jumlah ART
 2) persen terhadap ART usia kerja
 3) Rasio antara ART usia kerja dan ART usia kerja yang bekerja
 ART: Anggota rumah tangga;
 ART usia kerja: ART umur 15 - 55 tahun

Jenis pekerjaan utama kepala keluarga dan anggota rumah tangga ditampilkan pada Tabel 7 dan Tabel 8. Secara umum jenis pekerjaan dibedakan atas petani, buruh tani usaha (dagang, industri dan jasa/angkutan, buruh industri) dan lainnya. Proporsi pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani, berkisar antara 64 persen sampai 71 persen. Menarik untuk dilihat, proporsi pekerjaan KK (Kepala Keluarga) sebagai buruh tani, berkisar antara 16,5 persen (kasus Klaten) sampai 26 persen (kasus Ngawi). Jika hal ini dapat dianggap merepresentasikan kondisi wilayah, dapat diartikan bahwa proporsi petani pemilik di Jawa relatif lebih kecil dibandingkan di luar Jawa (Supriyati, 2003). Dapat juga mengandung arti bahwa rata-rata petani di luar Jawa memiliki lahan garapan sendiri yang lebih luas dan lebih merata. Fenomena relatif tingginya buruh tani di Jawa menunjukkan semakin timpangnya penguasaan lahan pertanian dan tersumbatnya aliran kelebihan tenaga kerja pertanian ke usaha non pertanian di pedesaan. Disamping itu, juga menunjukkan relatif berjalannya mekanisme pasar tenaga kerja di pedesaan melalui sistem pengupahan.

Tabel 9 menunjukkan distribusi ART menurut jenis pekerjaan utama. Secara umum, keragaan jenis pekerjaan utama ART sama dengan distribusi pekerjaan kepala keluarga dimana sebagian besar memiliki pekerjaan utama sebagai petani atau buruh tani. Namun jika dilihat lebih jauh proporsi ART yang pekerjaan utama petani lebih kecil dibandingkan dengan proporsi kepala keluarga dengan pekerjaan utama petani. Pada sisi lain proporsi buruh tani relatif sama. Penurunan proporsi ART dengan pekerjaan petani dibanding dengan proporsi pekerjaan utama kepala keluarga disebabkan karena sebagian ART pada

rumah tangga yang pekerjaan kepala keluarganya petani, bekerja bukan sebagai petani. Setidaknya ada tiga hal kemungkinan penyebabnya yaitu (1) lahan pertanian yang sempit, sehingga tidak mampu dijadikan mata pencaharian utama untuk anggota keluarga sehingga terpaksa menganggur atau mencari pekerjaan di luar usahatani, (2) Adanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian, dan (3) keengganan untuk terjun pada sektor pertanian khususnya untuk golongan muda terdidik karena dipandang tidak menarik sehingga lebih memilih pekerjaan lain atau menganggur. Sementara untuk buruh tani yang relatif tetap, dapat disimpulkan ART pada rumah tangga yang kepala keluarganya buruh tani sebagian besar ART nya juga berburuh tani. Hal ini antara lain disebabkan karena relatif kecil pilihan kesempatan kerja di luar pertanian.

Kesempatan kerja sektor non pertanian yang tersedia antara lain: buruh industri, terutama di Kabupaten Majalengka dan Klaten, yang proporsinya penyerapan tenaga kerjanya mencapai 18,6 persen dan 15 persen. Pada kabupaten lainnya jenis pekerjaan buruh industri relatif kecil yaitu berkisar antara 3 – 5 persen. Pekerjaan utama sebagai pedagang relatif merata pada semua lokasi penelitian, meskipun konsentrasinya terdapat Klaten (13,8%) dan Kediri (10,4%). Pada kabupaten lainnya relatif kecil dengan kisaran antara 4 – 9 persen. Sektor perdagangan nampaknya berkembang cukup merata pada semua lokasi penelitian, dan menjadi alternatif usaha utama di luar sektor pertanian. Jasa dan angkutan belum banyak berkembang dan menyerap tenaga kerja di pedesaan. Pada Kabupaten Indramayu sebesar 4 persen ART memiliki pekerjaan utama pada bidang jasa dan angkutan.

Tabel 7. Keragaan jenis pekerjaan utama kepala keluarga (KK) di lima kabupaten contoh, 2000-2001 (%)

Kabupaten/ Tipe Irigasi	Petani	Buruh tani	Industri	Dagang	Jasa dan angkutan	Buruh industri	Lainnya	Total ART bekerja
1. Indramayu	70	25	0	0	2.5	0	2.5	80
2. Majalengka	71.4	16.9	0	1.3	1.3	7.8	1.3	77
3. Klaten	68.4	16.5	1.3	1.3	1.3	1.3	10.1	79
4. Kediri	64.1	23.1	2.6	0	0	0	10.3	78
5. Ngawi	67.9	25.9	0	1.2	0	0	4.9	81

Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 8. Keragaan jenis pekerjaan utama anggota rumah tangga (ART) di lima kabupaten contoh, 2000-2001

Kabupaten/Tipe	Petani	Buruh tani	Industri	Dagang	Jasa dan angkutan	Buruh industri	Lainnya	Total ART bekerja
1. Indramayu	55.8	28.7	0.0	3.9	3.9	1.6	4.7	129
2. Majalengka	49.7	13.1	0.0	9.7	2.1	18.6	6.9	145
3. Klaten	36.5	20.4	2.4	13.8	1.8	15.0	10.2	167
4. Kediri	46.6	22.7	1.2	10.4	1.8	3.1	14.1	163
5. Ngawi	53.5	26.2	0.0	6.4	2.9	5.2	5.8	172

Sumber : Data Primer (Diolah)

Bidang usaha industri pengolah relatif belum berkembang hanya sebagian kecil di kabupaten Klaten dan Kediri terdapat ART dengan pekerjaan utama pada industri yaitu masing-masing hanya 1,3 dan 2,6 persen itupun hanya terkonsentrasi pada desa irigasi sederhana di Klaten (industri perajangan tembakau) dan desa tadah hujan di Kediri (industri gula merah tebu skala rumahtangga). Di luar jenis usaha/kegiatan yang disebutkan di atas masih terdapat jenis usaha/kegiatan yang sangat beragam. Terlihat bahwa kesempatan kerja non pertanian yang berkembang di pedesaan adalah kesempatan kerja yang bersifat usaha yang membutuhkan modal (kecuali kasus di Kabupaten Klaten dan Majalengka) sehingga tidak memungkinkan buruh tani akses terhadap kesempatan kerja tersebut. Penelitian Rachman (2003) menunjukkan bahwa pendapatan dari non pertanian menyebabkan ketimpangan pendapatan di pedesaan.

Berdasarkan pemaparan di atas, sektor pertanian terbukti masih besar peranannya dalam perekonomian di pedesaan. Relatif tingginya masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, disamping petani, menunjukkan sektor ini masih menjadi andalan sebagai tumpuan ekonomi rumahtangga. Sekalipun pada sisi lain fenomena buruh tani dapat dipandang sebagai akibat semakin terbatasnya lahan pertanian dan kesempatan kerja di luar sektor pertanian sekaligus rendahnya sumberdaya manusia di pedesaan.

Struktur alokasi curahan waktu kerja

Pembahasan berikut akan melihat alokasi curahan kerja ART yang bekerja pada berbagai bidang usaha yang dilakukan oleh rumahtangga contoh. Pembahasan akan dilakukan dengan agregasi kabupaten, dan pembahasan akan dibedakan atas: **(1)** rataan rumahtangga contoh total; dan **(2)** rumahtangga contoh dibedakan menurut statusnya yaitu rumahtangga contoh buruh tani dan rumahtangga contoh petani. Proporsi alokasi curahan kerja keluarga dapat dijadikan indikasi sumber pencaharian utama pada masyarakat. Tabel 9 dan Tabel 10 menunjukkan curahan jam kerja (dalam persen jam kerja) tenaga kerja dalam keluarga (rataan per ART yang bekerja) secara rata-rata dan menurut status rumahtangga pada berbagai kegiatan ekonomi.

Tabel 9. Curahan Waktu Kerja Per ART yang bekerja, di 5 Kabupaten 2001 (% Jam Kerja)

No	Uraian	Indramayu	Majalengka	Klaten	Kediri	Ngawi	Rataan
I	Curahan kerja pertanian	72,77	54,07	63,82	62,82	75,39	65,77
	1. Di lahan sawah milik sendiri	39,79	25,41	34,65	27,71	36,38	32,79
	2. Di lahan non sawah milik sendiri	3,40	10,94	14,59	10,75	8,84	9,70
	3. Buruhtani sawah	26,95	15,98	13,97	12,97	28,91	19,76
	4. Buruhtani non sawah	2,63	1,74	0,61	11,38	1,27	3,52
II	Curahan kerja non pertanian	27,23	45,93	36,18	37,18	24,61	34,23
	1. Usaha non pertanian	15,84	6,84	4,55	4,55	2,57	6,87
	2. Buruh non pertanian	7,29	28,63	10,16	8,17	7,45	12,34
	3. Tenaga profesional	4,11	10,47	21,47	24,46	14,59	15,02
III	Total curahan kerja (JK)	541,28	765,87	847,66	762,84	827,24	748,98
	Total curahan kerja (Setara HOK)	77	109	121	109	118	107

Sumber: data primer (diolah)

Catatan : 1HOK = 7 JK

Tabel 9 memperlihatkan bahwa secara umum curahan waktu kerja di sektor pertanian masih dominan dibandingkan dengan curahan kerja non pertanian, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian (rata-rata semua lokasi contoh) mencapai 65.77 persen, gambaran ini sesuai dengan gambaran makro dimana sektor pertanian masih menyerap 67.7 persen tenaga kerja, namun ada variasi antar kabupaten. Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian bervariasi antara 54.07 persen pada kasus Majalengka sampai dengan 75.39 persen di Kabupaten Ngawi, peranan sektor pertanian di Kabupaten Majalengka relatif kecil dibandingkan dengan kabupaten contoh lain. Curahan kerja non pertanian yang dominan pada lokasi penelitian adalah tenaga profesional (Kabupaten Klaten, Kediri, dan Ngawi), sementara di Kabupaten Indramayu adalah usaha non pertanian, di Kabupaten Majalengka buruh non pertanian lebih dominan. Dari hasil penelitian Rachman (2003) menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di Majalengka tidak lebih tinggi dari kabupaten Kediri dan Ngawi, hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor non pertanian di desa-desa contoh di Kabupaten Majalengka tidak lebih tinggi dari sektor pertanian. Fenomena ini juga menggambarkan bahwa adanya kesempatan kerja sektor pertanian yang bersifat musiman menyebabkan terjadi mobilitas tenaga kerja ke sektor non pertanian walau produktivitas tenaga kerja lebih kecil.

Pada sektor pertanian, secara rata-rata alokasi waktu kerja di lahan milik sendiri cenderung lebih besar dibandingkan dengan berburuh tani, dan sebagian besar tercurah pada lahan sawah. Kisaran alokasi waktu kerja untuk berburuh di lahan sawah, antara 13 persen (kasus Kediri) sampai 28.9 persen (kasus Ngawi) dari jam kerja total. Sementara alokasi jam kerja keluarga untuk berburuh tani di lahan non sawah berkisar antara 0.61 persen (kasus

Klaten) sampai 11.36 persen (kasus Kediri), relatif kecil dibandingkan dengan berburuh di lahan sawah, kecuali kasus Kediri yang hampir sama. Alokasi waktu kerja baik pada lahan sendiri maupun pada kegiatan berburuh tani masih terkonsentrasi pada lahan sawah, hal ini membuktikan bahwa lahan sawah di pedesaan lahan sawah masih memegang peranan penting sebagai sumber kesempatan kerja. Disamping itu, tingginya curahan jam kerja untuk berburuh tani dapat dijadikan indikator bahwa sebagian petani menggarap lahan yang sempit, dibanding dengan ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga (yang berkisar antara 2 – 4 orang) sehingga masih memungkinkan berburuh tani sebagai kegiatan sampingan.

Dilihat dari total curahan jam kerja per tahun (setara HOK, 1 HOK setara dengan 7 JK) per ART yang bekerja berkisar antara 77 HOK (kasus Kabupaten Indramayu) sampai yang tertinggi 118 HOK (kasus di Kabupaten Ngawi). Fenomena ini menunjukkan bahwa pada semua kabupaten contoh terjadi pengangguran terselubung, yang relatif besar terjadi di Kabupaten Indramayu. Kita semua tahu bahwa kesempatan kerja di sektor pertanian bersifat musiman berarti sektor pertanian memiliki kapasitas tertentu dalam menyerap tenaga kerja, dan gambaran di atas menunjukkan kesempatan kerja di luar sektor pertanian relatif terbatas terlihat dari partisipasi ART yang bekerja di luar sektor pertanian yang relatif kecil (Tabel 8) dan juga total curahan jam kerja yang belum optimal. Temuan ini sejalan dengan analisis data makro, yang menunjukkan masih relatif tingginya tenaga kerja yang bekerja dibawah kapasitas (52% pada tahun 2000).

Berdasarkan pekerjaan utama KK yang dibedakan atas petani dan buruh tani, maka pembahasan berikut adalah struktur curahan jam kerja ART yang bekerja pada rumahtangga petani dan rumahtangga buruh tani. Pada Tabel 10 ditampilkan curahan jam kerja (dalam persen jam kerja) tenaga kerja keluarga (rata-rata per ART yang bekerja) pada rumahtangga petani dan buruh tani pada berbagai kegiatan ekonomi. Tabel 10 memperlihatkan bahwa secara umum curahan kerja pada sektor pertanian pada rumah tangga buruh tani lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga petani. Hal ini menunjukkan bahwa petani kecil kurang akses terhadap kesempatan kerja di sektor non pertanian. Secara rata-rata curahan waktu kerja rumahtangga buruh tani di sektor pertanian sebesar 78.32 persen (antar lokasi berkisar antara 67 – 85 persen) sementara pada rumahtangga petani sebesar 62.63 persen (berkisar antara 51-74 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa rumahtangga buruhtani masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian sekaligus sebagai sumber pendapatan. Curahan waktu kerja rumahtangga buruhtani didominasi oleh kegiatan berburuh, dan pada rumahtangga petani tercurah pada lahan milik sendiri. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari distribusi penguasaan lahan.

Tabel 10. Curahan Kerja Anggota Keluarga Per ART yang Bekerja Menurut Status Rumahtangga (petani vs buruh tani) di Tujuh Kabupaten (% jam Kerja)

No	Uraian	Indramayu		Majalengka		Klaten		Kediri		Ngawi		Rataan	
		Buruh tani	Petani	Buruh tani	Petani	Buruh tani	Petani	Buruh tani	Petani	Buruh tani	Petani	Buruh tani	Petani
I	Curahan kerja pertanian	85,07	68,18	67,85	51,53	83,65	61,08	76,07	58,09	78,98	74,28	78,32	62,63
	1. Di lahan sawah milik sendiri	2,54	53,69	2,12	29,70	8,18	38,32	-	37,60	1,37	47,21	2,84	41,30
	2. Di lahan non sawah milik sendiri	3,59	3,32	7,69	11,54	15,42	14,47	5,82	12,51	8,26	9,02	8,16	10,17
	3. Buruhtani sawah	69,78	10,97	46,87	10,29	59,91	7,62	35,68	4,87	64,53	17,89	55,35	10,33
	4. Buruhtani non sawah	9,15	0,20	11,17	-	0,14	0,67	34,57	3,11	4,82	0,17	11,97	0,83
II	Curahan kerja non pertanian	14,93	31,82	32,15	48,47	16,35	38,92	23,94	41,91	21,02	25,72	21,68	37,37
	1. Usaha	11,07	17,62	2,38	7,66	-	5,18	2,11	5,42	4,21	2,06	3,96	7,58
	2. Buruh Non perta	2,07	9,23	29,77	28,42	14,76	9,52	6,21	8,87	12,03	6,04	12,97	12,42
	3. Karyawan/pegawai	1,79	4,97	-	12,39	1,59	24,22	15,61	27,62	4,78	17,62	4,75	17,37
III	Total curahan kerja (JK)	588	526	723	774	634	889	869	731	782	842	719	752
	Total curahan kerja (Setara HOK)	84	75	103	111	91	127	124	104	112	120	103	107

Sumber : Data primer (diolah)
Catatan : 1HOK = 7 JK

Rataan lima kabupaten contoh menunjukkan bahwa curahan waktu kerja di sektor pertanian pada rumahtangga buruh tani dan petani masing-masing adalah 78.32 dan 62.63 persen. Pada rumahtangga buruh tani didominasi oleh kegiatan berburuh tani dan pada rumahtangga petani didominasi oleh kegiatan di lahan sawah milik sendiri. Curahan jam kerja pada rumah tangga petani pada sektor pertanian antar lokasi berkisar antara 51.53 (kasus Kabupaten Majalengka) sampai dengan 74.28 persen (kasus Kabupaten Ngawi) dari total jam kerja, sementara pada rumah tangga buruh tani berkisar antara 67 – 85 persen. Pada sektor pertanian, proporsi curahan kerja pada usahatani sawah lebih dominan baik pada usaha tani sendiri (pada rumahtangga petani) dan berburuh tani (pada rumahtangga buruh tani) dibandingkan dengan kegiatan lain. Tingginya proporsi curahan kerja pada usahatani sawah menunjukkan bahwa rumahtangga petani dalam kegiatan usahatannya banyak menggunakan tenaga kerja dalam keluarga, hal ini menyebabkan semakin terbatasnya kesempatan kerja bagi buruh tani.

Dilihat dari total curahan jam kerja per tahun (setara HOK) per ART yang bekerja pada rumahtangga petani berkisar antara 75 HOK - 127 HOK, sementara pada rumahtangga buruh tani berkisar antara 84 – 124 HOK. Baik pada rumahtangga petani maupun buruh tani pada semua kabupaten contoh, terjadi pengangguran terselubung. Pada rumahtangga buruh tani, mereka hanya bekerja 23 – 34 persen dari hari kerja yang tersedia, sementara pada rumahtangga petani berkisar antara 21 – 35 persen dari hari kerja yang tersedia yaitu 364 hari kerja per tahun. Temuan ini menunjukkan bahwa waktu kerja di pedesaan belum optimal, masih jauh di bawah kapasitas dan diduga disebabkan karena terbatasnya kesempatan kerja.

Dihubungkan dengan tulisan Rachman (2003) tentang struktur pendapatan, nampak bahwa sumbangan pendapatan sektor pertanian tidak sebesar proporsi alokasi curahan kerja pada sektor yang sama, kecuali kasus di Kabupaten Indramayu. Hal ini sesuai dengan gambaran secara makro di mana peranan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dan PDB tidak seimbang. Fenomena menunjukkan bahwa secara rata-rata produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dibawah sektor non pertanian, kecuali kasus yang terjadi di Majalengka. Suatu hal yang perlu dicermati lebih lanjut adalah adalah jenis kegiatan/usaha sektor non pertanian apa yang mampu memberikan produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi. Bisa jadi suatu sektor yang memerlukan modal yang cukup tinggi, sehingga kesempatan kerja ini tidak dapat dimasuki oleh semua tenaga kerja dan atau kesempatan kerja yang tersedia adalah kegiatan non pertanian dengan upah relatif rendah. Misalnya, kasus di Kabupaten Majalengka, dimana di daerah ini berkembang kesempatan kerja buruh non pertanian (pada industri genteng dan bata merah), namun kesempatan kerja ini tidak mampu meningkatkan pendapatan per kapita pada rumahtangga buruh tani (Rp 519.6 ribu/tahun) yang curahan kerja pada kegiatan ini cukup besar (29.77% dari total jam kerja).

Dari uraian pada lima lokasi penelitian, sektor pertanian masih menjadi kesempatan kerja utama bagi rumahtangga pedesaan, sekalipun sebagian diantaranya bekerja di luar sektor non pertanian. Secara rata-rata, penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sesuai dengan gambaran penyerapan tenaga kerja secara makro. Suatu hal yang menarik perhatian adalah tingginya ketergantungan rumahtangga buruh tani terhadap sektor pertanian terutama pada kegiatan berburuh tani di lahan sawah, dan nampak kurang aksesnya rumahtangga buruh tani terhadap kesempatan kerja non pertanian. Hal ini bila dilihat dari total curahan kerja per tahun yang masih relatif rendah (dibawah 50 % dari ketersediaan hari kerja) dan rendahnya pendapatan per kapita rumahtangga buruh tani. Atau memang di lokasi tersebut tidak tersedia kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan kajian khusus tentang ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Sementara pada rumahtangga petani, alokasi waktu kerja lebih banyak pada usahatani sawah garapannya sendiri. Dilihat dari total jam kerja, baik pada rumahtangga total, rumahtangga petani dan buruh tani maupun pada rumahtangga menurut luas sawah garapan terlihat bahwa total jam kerja per ART yang bekerja per tahun masih relatif rendah (dibawah 200 HOK per tahun). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja masih bekerja dibawah kapasitasnya, dengan kata lain terjadi pengangguran terselubung di pedesaan, seperti yang tergambar pada ketenagakerjaan tingkat makro. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan kesempatan kerja di luar pertanian dan tersumbatnya mobilitas tenaga kerja pertanian ke non pertanian.

PERKEMBANGAN TINGKAT UPAH SEKTOR PERTANIAN

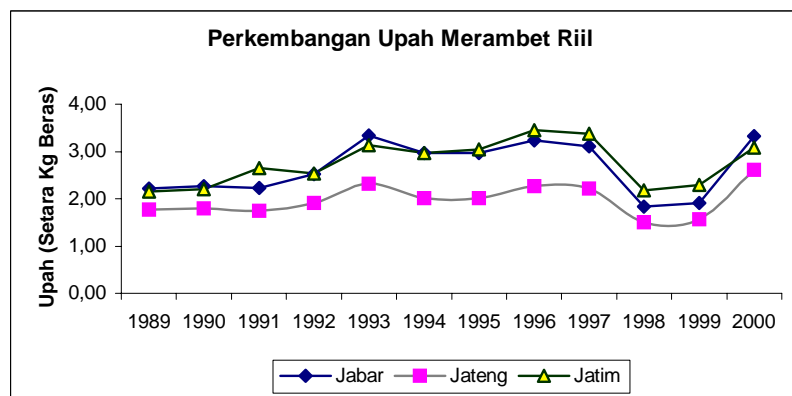
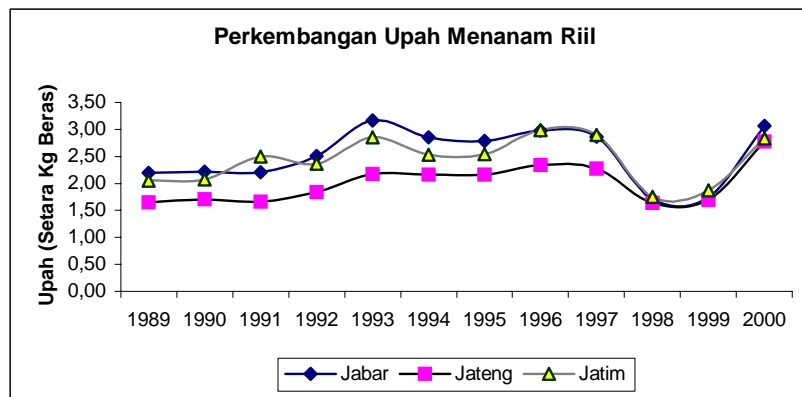
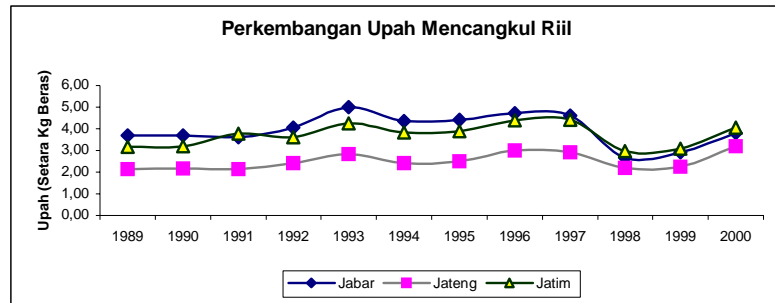
Tingkat upah adalah nilai tukar dari tenaga kerja yang dijual kepada orang lain. Tingkat upah di sektor pertanian ditentukan oleh pasar tenaga kerja (interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja), pasar komoditas (sebagai input produksi, permintaan tenaga kerja dapat dipandang sebagai permintaan dari komoditas dalam proses produksi), faktor kelembagaan tenaga kerja yang ada (sifatnya spesifik lokasi) dan sosial budaya. Menurut Erwidodo (1993) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah pertanian di suatu wilayah, antara lain : ketersediaan tenaga kerja, kesempatan kerja di sektor pertanian, komoditas dominan yang diusahakan, luas areal irigasi, aksesibilitas wilayah dan ketersediaan kesempatan kerja di sektor non-pertanian. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan tingkat upah sektor pertanian bervariasi antar jenis kegiatan, jender, sistem pengupahan dan wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan Statistik Upah Buruh Tani Di Pedesaan yang diagregasi menurut kegiatan (mencangkul, menanam dan merambat) dan propinsi. Data upah buruh tani nominal dari BPS pada periode tahun 1989 – 2000 pada tiga propinsi contoh tidak menunjukkan suatu fenomena yang spesifik, artinya tidak dapat dikatakan tingkat upah di suatu daerah lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Tingkat upah nominal pada periode tersebut meningkat, dengan tingkat pertumbuhan yang hampir sama antar propinsi, untuk tingkat upah secara rata-rata berkisar antara 15 persen per tahun. Tingkat upah nominal buruh tani meningkat, tidak ada spesifikasi antar lokasi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah sektor pertanian bersifat dinamis. Data perkembangan tingkat upah dan tingkat pertumbuhan pada periode 1989 –2000 ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11. Perkembangan tingkat upah buruh tani di tiga propinsi contoh, 1989-2000

Propinsi	Kegiatan	Tingkat upah (Rp/Orang/Setengah Hari)	Tingkat pertumbuhan upah (%/th)	
			Nominal	Riil 1)
Jawa Barat	Mencangkul	3768.6	13.94	-0.94
	Menanam	2465.8	15.53	0.40
	Merambat	2633.4	16.20	1.17
	Rataan	2955.9	15.23	0.21
Jawa Tengah	Mencangkul	2305.3	15.48	2.17
	Menanam	1844.2	15.77	2.58
	Merambat	1776.2	14.64	1.24
	Rataan	1975.2	15.30	2.00
Jawa Timur	Mencangkul	3542.4	15.67	0.70
	Menanam	2303.4	15.58	0.66
	Merambat	2650.2	16.24	1.66
	Rataan	2832.0	15.83	1.01

Sumber: Statistik Upah Buruh Tani Di Pedesaan , BPS (Berbagai Tahun, diolah)

Bagaimana sebenarnya perkembangan upah buruh tani riil pada periode tersebut. Untuk mengetahui upah riil buruh tani di propinsi contoh, upah nominal dideflasi dengan rata-rata harga beras di pedesaan masing-masing propinsi. Pertumbuhan tingkat upah riil ditampilkan pada Tabel 11 dan perkembangannya ditampilkan pada grafik di bawah ini.



Pada periode 1989 – 2000, di Jawa Tengah dan Jawa Timur tingkat upah riil masih meningkat, walau relatif kecil, yaitu 1.03 persen (Jawa Tengah) dan 1.81 persen (Jawa Timur) per tahun. Sementara di Jawa Barat, tingkat upah mencangkul riil menurun (-0.09%/tahun), sedang tingkat upah menanam dan merambat meningkat masing-masing 1.25 dan 2.03 persen per tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat upah, dalam kasus ini, pertumbuhan tingkat upah riil yang menurun disebabkan karena pertumbuhan tingkat upah lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan harga beras di tingkat konsumen. Pada periode yang sama pertumbuhan harga beras di pedesaan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebesar 16.18, 13.95 dan 15.93 persen per tahun (Statistik Harga Konsumen Pedesaan Di Indonesia, BPS Berbagai tahun, diolah). Fenomena ini menunjukkan bahwa posisi buruh tani masih lemah dalam proses tawar menawar tingkat upah, tingkat upah buruh tani tidak mengikuti perkembangan harga. Dengan demikian, indikasi gejala *over supply* tenaga kerja di pedesaan sedang berlangsung.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Secara makro, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di pedesaan masih cukup tinggi, sementara sumbangan sektor pertanian terhadap PDB semakin menurun, sehingga mengakibatkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. Data yang sama menunjukkan peningkatan pengangguran terbuka dan pengangguran tidak kentara di pedesaan yang masih relatif besar, walau ada kecenderungan menurun pada tahun 2000. Beberapa kebijakan publik yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan tingkat upah antara lain : (1) Pembangunan prasarana jalan dan sarana transportasi yang akan meningkatkan keterkaitan desa (pertanian) - kota (tujuan pasar), sehingga mobilitas tenaga kerja meningkat; (2) Penyediaan fasilitas pasca panen, industri pengolahan dan infrastruktur pemasaran di tingkat desa, sehingga kesempatan kerja dan nilai tambah dari kegiatan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat pertanian di pedesaan; dan (3) Penyediaan pusat pelayanan informasi khususnya informasi pasar (haga, tujuan-tujuan pasar, daya serap pasar dan lain-lain).
2. Hasil kajian di tingkat mikro menunjukkan bahwa secara umum curahan kerja pada sektor pertanian masih dominan dibandingkan dengan curahan kerja non pertanian, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian (rata-rata semua lokasi contoh) mencapai 65.77 persen, gambaran ini sesuai dengan gambaran makro dimana sektor pertanian masih menyerap 67.7 persen tenaga kerja, namun ada variasi antar kabupaten. Secara umum curahan kerja pada sektor pertanian pada rumah tangga buruh tani lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga petani, curahan waktu kerja rumahtangga buruh tani

di sektor pertanian sebesar 78.32 persen, sementara pada rumahtangga petani sebesar 62.63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa rumahtangga buruh tani masih mengadakan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian sekaligus sebagai sumber pendapatan. Implikasi penting dari kondisi tersebut adalah melalui optimalisasi penggunaan lahan melalui peningkatan intensitas tanam, pengembangan diversifikasi usahatani komoditas komersial yang bersifat padat tenaga kerja, usaha-usaha konsolidasi lahan dan manajemen usahatani, serta pengembangan dan pendalaman agroindustri berbasis bahan baku setempat.

3. Total curahan jam kerja per tahun (setara HOK) per ART yang bekerja berkisar antara 75 HOK - 127 HOK atau 21 – 35 persen dari hari kerja yang tersedia, artinya terjadi pengangguran terselubung di daerah pedesaan sesuai dengan gambaran makro, tidak ada perbedaan total curahan jam kerja yang nyata antara rumahtangga buruh tani dan petani. Temuan ini menunjukkan bahwa waktu kerja di pedesaan belum optimal, masih jauh di bawah kapasitas (*under capacity*). Oleh karena kesempatan kerja di sektor pertanian bersifat musiman (sektor pertanian memiliki kapasitas tertentu dalam menyerap tenaga kerja), gambaran di lokasi kajian mengindikasikan kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang relatif terbatas. Dalam konteks demikian, pengembangan kegiatan ekonomi rakyat non pertanian menjadi urgen, seperti industri genteng-batu bata, industri kecil-meubeler, dan usaha dagang kecil-kecilan.
4. Pada periode 1989 – 2000, tingkat upah riil di tiga propinsi contoh masih meningkat, walau relatif kecil, yaitu berkisar antara 1.03 – 2.03 persen per tahun, kecuali tingkat upah mencangkul di Jawa Barat yang cenderung menurun (-0.09%/tahun). Fenomena ini menunjukkan bahwa posisi buruh tani masih lemah dalam proses tawar menawar tingkat upah, tingkat upah buruh tani tidak mengikuti perkembangan harga. Dengan demikian, indikasi gejala *over supply* tenaga kerja di pedesaan terutama di sektor pertanian sedang berlangsung. Implikasinya kesejahteraan rumahtangga buruh tani akan menurun, sehingga diperlukan pengembangan usahatani padi dan komoditas komersial di lahan sawah yang efisien, yang mampu memberikan tingkat upah riil yang meningkat agar tingkat kesejahteraan buruh tani tidak tertinggal. Temuan ini dapat sebagai masukan bahwa dalam penentuan sasaran yang layak memperoleh bantuan Program Raskin perlu memasukkan indikator status pekerjaan sebagai buruh tani.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagyo, A.S dan Sumaryanto. 1997. Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan Provinsi Jawa Tengah. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- BPS, 1995. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 1995. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BPS, 2001. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Tahun 1995. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BPS, 1990. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- BPS, 1990. Penduduk Indonesia. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Badan Pusat Statistik. Jakarta
- Erwidodo;M. Syukur; B. Rachman; G.S.Hardono. 1993. Evaluasi Perkembangan Tingkat Upah Di Sektor Pertanian. Monograph Series NO. 15. Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 1993.
- Gunawan,M., A. Pakpahan dan E. Pasandaran. 1989. Perubahan Kelembagaan Pertanian pada Pasca Adopsi Padi Unggul *dalam* Prosiding Evolusi Kelembagaan Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Mubyarto, 1985. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta
- Rachmat. M; Supriyati, Hendiarto. 2000.Dinamika Kelembagaan Lahan dan Hubungan Kerja Pertanian *dalam* Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah, PenyuntingI.W.Rusastra. Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 2000. Bogor. p:226-238.
- Rachman,B. 1989. Sistem Hubungan Kerja dan Distribusi Pendapatan di Pedesaan Jawa Barat *dalam* Prosiding Evolusi Kelembagaan Pedesaan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saleh,C. 1997. Studi Dinamika Kesempatan Kerja dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Saptana, Maesti M. dan M. Syukur. 2000. Pola Hubungan Kerja Sektor Pertanian di Pedesaan Jawa Timur *dalam* Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah, PenyuntingI.W.Rusastra. Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 2000. Bogor. p:278-290.
- Sumaryanto, 1988. Kajian Tenaga Kerja an Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Tesis Pasca Sarjana, IPB, Bogor.
- Supriyati, 1990. Kajian Tingkat Upah di Pedesaan Jawa (Kasus di Jawa Barat). Tesis Pasca Sarjana, IPB, Bogor.
- Supriyati dan N. Syafa'at. 2000. Analisis perubahan Struktur Kesempatan Kerja Di Indonesia, 1995-1998: Implikasinya pada Peran Sektor Pertanian dalam Penyerapan Tenaga Kerja *dalam* Prosiding Perspektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Dalam Era Otonomi Daerah, Penyunting I.W.Rusastra. Pusat penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 2000. p: 128-1.
- Syukur, M., 1988. Kajian Aktivitas Tenaga Kerja Rumahtangga Tani di Luar Sektor Pertanian (Studi Beberapa Desa di Jawa Barat). Tesis Pasca Sarjana, IPB, Bogor.
- Tirto Sudarmo R. 1993. Migrasi dan Perubahan Sosial di Masa Orde Baru. AnalisisCSIS. Jakarta.
- Wiradi, J. Dan Makali. 1984. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. p: 43 – 130.

Lampiran 1. Jumlah rumahtangga contoh menurut status rumahtangga di lima kabupaten contoh, 2001

Kabupaten	Rumahtangga		
	Petani	Buruh Tani	Total
1. Indramayu	60	20	80
2. Majalengka	67	13	80
3. Klaten	67	13	80
4. Kediri	60	18	78
5. Ngawi	60	20	80
6. Agam	74	5	79
7. Sidrap	71	9	80

Sumber: Data Primer